

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi yang mana setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasca reformasi 1998 terjadi perubahan struktural yang memunculkan berbagai partai politik. Melalui partai politik rakyat dijamin secara bebas untuk memilih dan dipilih terhadap siapa saja yang akan menjadi wakil mereka dan siapa yang akan menjadi pemimpin dari perwakilan rakyat atas menentukan kebijakan umum (*public policy*) oleh UUD.<sup>1</sup> Maka berdasarkan salah satu fungsinya, partai politik sebagai sarana komunikasi politik seperti sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, wadah partisipasi dan aspirasi politik masyarakat.<sup>2</sup> Fungsi komunikasi politik perlu dijalankan karena partai politik menjadi sebuah wadah yang digunakan oleh warga negara sebagai sarana berpartisipasi yang didalamnya terdapat gagasan, ide, dan nilai sebagai landasan partai politik pada pelaksanaannya.

Dalam terbentuknya partai politik tidak lepas sebagai sarana untuk menjadikan wadah kepentingan kelompok-kelompok masyarakat tertentu atas aspirasi pendukungnya. Maka dalam kepentingan partai biasanya program-

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 43 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

<sup>2</sup> Miriam Budiarjo. 1994. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 26

program yang akan diusungnya merupakan pengaruh dari organisasi masyarakat, seperti asosiasi bisnis, serikat buruh, organisasi agama, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) atas dukungan terhadap partai. Hubungan partai politik dengan organisasi masyarakat yang ikut berpartisipasi terhadap konteks politik partai inilah yang sebagai komunikasi politik. Melalui komunikasi politik ini, partai dapat dibangun berdasarkan aspirasi dari organisasi masyarakat pada basis pergerakan kedaulatan rakyat untuk mendapatkan dukungan pada proses legislator sebagai pemangku kebijakan. Lebih lanjut, pembentukan partai politik dalam percaturan politik di Indonesia perlu didukung dari kalangan kelompok-kelompok loyal yang menjadi kunci basis ideologinya. Dalam sebuah partai tidak terlepas dari peran komunikasi politik dalam membangun jaringan kekuatan dasar dalam permainan politik pada kontestasi pemilu.

Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Setiap orang atau kelompok dalam suatu organisasi memiliki perbedaan dalam berkomunikasi, sehingga dalam komunikasi terdapat proses-proses tertentu sebagai manifestasi perilaku manusia dalam berkomunikasi.<sup>3</sup> Pengertian komunikasi politik menurut Dan Nimmo Politik berasal dari kata *polis* yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya.<sup>4</sup> Maka dalam ranah politik komunikasi menjadi bentuk proses partai politik dengan masyarakat secara individu maupun kelompok dalam memperkuat basisnya, kemudian komunikasi

---

<sup>3</sup> Anisasari, Azmi Zuam (2015) *Pola komunikasi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten sleman*. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial.

<sup>4</sup> Dan Nimmo. 1989. *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Karya. Hlm. 108.

politik juga sebagai suatu proses komunikasi yang memiliki pengaruh dalam dinamika politik.

Komunikasi politik yang baik akan memperoleh hasil interaksi politik yang baik pula dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan tersebut dapat dilihat secara langsung dan dapat dimanfaatkan oleh partai politik salah satunya dalam segi pembentukan partai, dalam membangun partai yang baik dapat menjadi tolak ukur keberhasilan yang dicapai oleh partai dalam komunikasi politik di internal partainya. Singkatnya komunikasi politik identik dengan proses komunikasi didalam tubuh partai, karena komunikasi merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga diperoleh feedback dari penerima pesan. Dari proses komunikasi akan timbul kegiatan bersama, komitmen, penguatan basis, dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi.

Komunikasi politik pada fenomena ini peneliti melihat lebih mendalam dari pembentukan Partai Buruh. Partai Buruh dideklarasikan pada perhelatan Kongres Partai Buruh tanggal 4-5 Oktober 2021 di Jakarta menjadi momentum yang menarik bagi para konstituennya.<sup>5</sup> Di dalam website resmi Partai Buruh diketahui bahwasannya Partai Buruh dibangun dan didirikan kembali oleh para pendiri yang berasal dari 4 Konfederasi serikat pekerja terbesar dan 50 Federasi serikat pekerja tingkat nasional, forum guru dan tenaga honorer, dan organisasi petani serta nelayan terbesar di Indonesia.<sup>6</sup> Banyaknya dukungan dari kelompok-kelompok buruh dan pekerja yang mendukung di belakangnya menjadi modal besar bagi

<sup>5</sup>Pinterpolitik.com. 2021. *Ruang Publik di Balik Deklarasi Partai Buruh*. <https://www.pinterpolitik.com/ruang-publik/di-balik-deklarasi-partai-buruh/> (diakses pada tanggal 10 Januari 2023).

<sup>6</sup> Partai Buruh. 2022. *Sejarah Partai Buruh*. <https://partaiburuh.or.id/sejarah> (diakses pada tanggal 9 Januari 2023).

Partai Buruh. Modal ini menjadi pengingat Partai Buruh akan potensial dari anggota serikat buruh yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Gerakan buruh dalam politik di Indonesia sudah bukanlah hal yang baru karena sebelumnya ada berbagai partai yang membawa kepentingan buruh walaupun tidak secara gamblang mengangkat nama buruh. Partai bernuansa semangat buruh yang pernah ada di Indonesia ada Partai Pekerja Indonesia (PPI), Partai Buruh Nasional (PBN), Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI), Partai Solidaritas Pekerja (PSP) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Sebelumnya, Partai Buruh pernah berusaha mengikuti Pemilu Tahun 2004 dan Tahun 2009.<sup>7</sup> Kemudian pada keikutsertaan Partai Buruh di awal Pemilu juga hanya didukung oleh satu konfederasi serikat buruh, yakni Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).<sup>8</sup>

Berdasarkan proses bagaimana pembentukan Partai Buruh yang awalnya adanya beragam pertentangan orientasi bahkan kepentingan dari berbagai elemen buruh cukup kontras pada tahun-tahun sebelumnya, hingga kemudian dihidupkan kembali bentuk Partai Buruh pada Pemilu Tahun 2024 ini menjadi suatu langkah konkrit yang menarik. Jika dibandingkan dengan keadaan sekarang, peneliti berpendapat telah melihat perubahan dari kesamaan perjuangan tiap organisasi inisiator Partai Buruh dengan sudah berjalannya komunikasi politik yang baik secara kesatuan dari gerakan buruh, sehingga dapat bersatu membangun kembali Partai Buruh.

<sup>7</sup> Dodi Faedlulloh. 2019. Kegagalan Gerakan Buruh dan Partai Buruh pada Pemilu Era Reformasi. *Jurnal Politica*. Vol. 10 (2): 167-182.

<sup>8</sup> Nasionalkompas.com. 2021. *Partai Buruh Kembali Dideklarasikan, Ini Bedanya Dari yang Lama*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/19005351/partai-buruh-kembali-dideklarasikan-ini-bedanya-dari-yang-lama> (diakses pada tanggal 9 Januari 2023).

Keikutsertaan Partai Buruh dalam kontestasi Pemilu 2024 ini berdasarkan dengan pengumuman daftar partai peserta Pemilu 2024 yang secara resmi telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 kemudian ada penetapan terbaru pada Jumat tanggal 30 Desember 2022.<sup>9</sup> Dari seluruhnya terdapat 18 partai politik, salah satunya Partai Buruh yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Ketetapan ini berdasarkan hasil dalam rapat pleno rekapitulasi nasional dari hasil verifikasi partai politik dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024.<sup>10</sup> Masuknya Partai Buruh dalam kontestasi politik tidak luput dari banyaknya dukungan dari kelompok-kelompok buruh dan pekerja yang mendukung di belakangnya sehingga menjadi modal besar bagi Partai Buruh. Modal ini menjadi penguat Partai Buruh akan potensial dari anggota serikat buruh yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dukungan politik Partai Buruh seperti ini merupakan ada kaitannya bagaimana satu partai melakukan komunikasi politik dengan konstituennya.

Komunikasi politik memiliki peran penting bagi partai politik dalam konteks penguatan basis masanya. Menurut Dahlan dari Achmad Herman bahwa komunikasi politik merupakan bidang atau disiplin yang menelaah perilaku atau kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.<sup>11</sup> Kemudian menurut ahli komunikasi politik Galnoor seperti yang dikutip oleh Achmad Herman menyatakan bahwa

<sup>9</sup> Sekretariat Kabinet. 2022. *Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024*. <https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/> (diakses pada tanggal 10 Februari 2023).

<sup>10</sup> Nasionalkompas.com. 2023. *Bertambah Partai Ummat, Ini Daftar 24 Parpol Peserta Pemilu 2024*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/02/20155581/bertambah-partai-ummat-ini-daftar-24-parpol-peserta-pemilu-2024> (diakses pada tanggal 9 Januari 2023).

<sup>11</sup> Achmad Herman. 2013. *Dasar-Dasar Komunikasi Politik*. Palu: UNTAD Press. Hlm. 19

tanpa komunikasi tidak akan ada usaha bersama dan dengan demikian tidak ada politik.<sup>12</sup> Oleh karena itu komunikasi politik harus mencakup pemahaman yang baik terhadap internal partai politik yang akan digunakan kadernya, sehingga nantinya komunikasi politik yang digunakan dapat membantu partai politik untuk menggagas ide, perjuangan, dan pemikiran yang dapat mempengaruhi kader-kadernya.

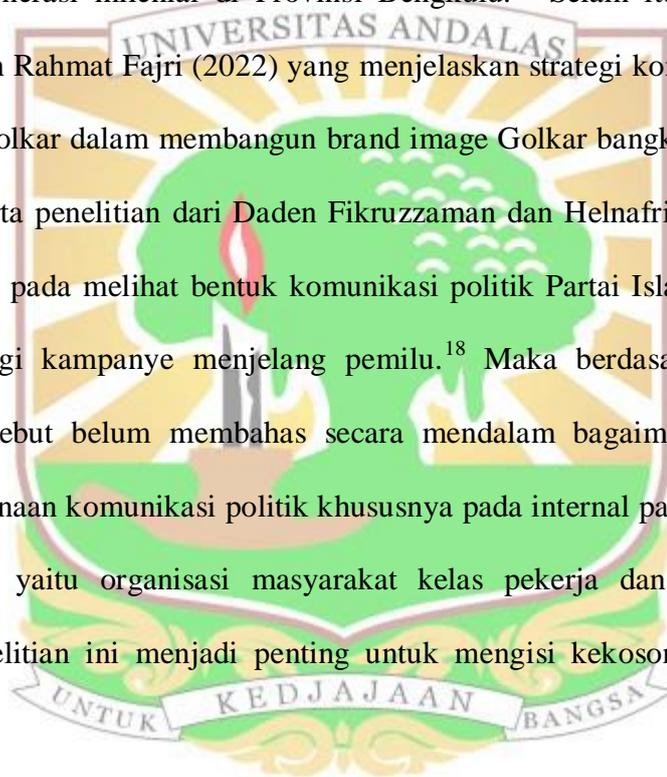
Menurut Miriam budiarjo, terdapat empat macam peran partai politik, pertama sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi seseorang untuk memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena. Kedua, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan pengkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif. Ketiga, sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana perumusan kepentingan. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen dan kemungkinan berpotensi konflik.<sup>13</sup> Maka partai politik harus memiliki pemahaman yang baik terhadap komunikasi, sehingga nantinya komunikasi itu dapat membantu partai dalam mengintegrasikan dukungan secara efektif terhadap pembentukan partai. Pentingnya komunikasi politik bagi Partai Buruh khususnya yang mana belum memiliki sistem kaderisasi yang jelas.

Penelitian mengenai komunikasi politik sudah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian oleh Yulia Istitania (2019) yang meneliti strategi komunikasi politik Partai Demokrat Jawa Timur dalam meraih

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 405-409.

dukungan suara di pemilihan umum legislatif 2019.<sup>14</sup> Kemudian, penelitian Muhammad Taufik (2019) yang menjelaskan upaya strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Riau dalam mengembangkan partai.<sup>15</sup> Penelitian oleh Haza Karimalla dan Sri Dwi Fajarini (2021) yang berusaha menganalisis strategi komunikasi pemasaran politik Partai Solidaritas Indonesia dalam membangun citra partai pada segmentasi generasi milenial di Provinsi Bengkulu.<sup>16</sup> Selain itu, terdapat juga penelitian oleh Rahmat Fajri (2022) yang menjelaskan strategi komunikasi politik DPD Partai Golkar dalam membangun brand image Golkar bangkit di Kabupaten Kampar.<sup>17</sup> Serta penelitian dari Daden Fikruzzaman dan Helnafri Ankesa (2022) yang berfokus pada melihat bentuk komunikasi politik Partai Islam di Indonesia sebagai strategi kampanye menjelang pemilu.<sup>18</sup> Maka berdasarkan penelitian terdahulu tersebut belum membahas secara mendalam bagaimana partai baru dalam pelaksanaan komunikasi politik khususnya pada internal partai seperti pada fenomena ini yaitu organisasi masyarakat kelas pekerja dan serikat buruh, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan penjelasan



<sup>14</sup> Yulia Istitania. 2019. Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrat Jawa Timur Dalam Meraih dukungan Suara Pada Pileg 2019. *Skripsi*. Universitas Airlangga.

<sup>15</sup> Muhammad Taufik. 2019. Strategi Komunikasi Politik Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Riau Dalam Mengembangkan Partai. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>16</sup> Haza Karimalla dan Sri Dwi Fajarini. 2021. Strategi Komunikasi Pemasaran Politik Partai Solidaritas Indonesia Dalam Membangun Citra Partai Politik Pada Segmentasi Generasi Milenial Di Provinsi Bengkulu. *Skripsi*. Program Studi Ilmu komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

<sup>17</sup> Rahmat Pajri. 2022. Strategi Komunikasi Politik DPD Partai Golkar dalam Membangun Brand Image Golkar Bangkit di Kabupaten Kampar. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>18</sup> Daden Fikruzzaman dan Helnafri Ankesa. 2022. Komunikasi Politik Partai Islam Menjelang Pemilu. *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*. Vol. 3 (1): 35-46.

tentang komunikasi politik organisasi inisiator pembentukan partai di Partai Buruh Sumatera Barat.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan komunikasi politik antara organisasi inisiator Partai Buruh Sumatera Barat, dimana hal ini merupakan sebagai proses komunikasi yang unik. Hal tersebut disebabkan karena organisasi inisiator kelas pekerja ini yang sebelumnya notabene merupakan parlemen jalanan dengan kesamaan visi misinya yang tergabung dalam suatu partai politik yang sah untuk ikut ke dalam parlemen legislatif. Fenomena ini juga menjadi menarik karena Partai Buruh saat ini merupakan partai yang baru bergabung dalam kontestasi Pemilu Tahun 2024 dengan didukung oleh banyak konfederasi dan serikat pekerja, buruh, petani, dan lain-lain.

Dengan melihat fenomena ini, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana Komunikasi Politik Organisasi Inisiator Pembentuk Partai Partai Buruh Sumatera Barat. Bagaimana penyampaian pesan-pesan komunikasi, *feedback*, dan komitmen dari komunikasi yang terbentuk di jaringan yang sudah terbentuk tersebut. Serta pelaksanaan sosialisasi dan rekrutmen politik yang seperti apa pada kasus ini yaitu organisasi inisiator kelas pekerja untuk mengikuti partisipasi politik dan membentuk sebuah partai. Penelitian ini tertarik untuk mengetahui bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh organisasi inisiator di daerah Sumatera Barat, apakah komunikasi politik organisasi-organisasi inisiator dalam pembentukan Partai Buruh Sumatera Barat terlihat adanya komunikasi yang kuat di pusat tersebut juga dilakukan di daerah. Fungsi komunikasi politik perlu diteliti karena Partai Buruh Sumatera Barat yang telah

terbentuk tentu telah menjalankan proses sosialisasi politik dan rekrutmen politik yang bergantung pada komunikasi politik..

Almond dalam Komunikasi Politik Ardial, yang menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh sistem politik diantaranya ada sosialisasi politik, perekrutan, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan aturan, aplikasi aturan dan aturan putusan hakim.<sup>19</sup> Peneliti condong ingin melihat bagaimana ketika itu sebuah organisasi inisiator yang terdiri dari tiga organisasi, kemudian bagaimana sosialisasi dan rekrutmen politik pada organisasi-organisasi inisiator di Sumatera Barat yang tergabung dalam pembentukan Partai Buruh Sumatera Barat adanya komunikasi politik sehingga organisasi-organisasi tersebut bersatu.

Penelitian ini menggunakan teori komunikasi, dengan teori komunikasi politik Gabriel Almond sehingga dapat mengkaji komunikasi politik organisasi inisiator pembentukan partai di Partai Buruh Sumatera Barat. Teori ini digunakan juga sebagai salah satu upaya untuk mengungkap aktivitas dan peran kelompok pekerja dan serikat buruh dalam mempengaruhi pembentukan Partai Buruh pada persiapan Pemilu Tahun 2024. Oleh karena itu fokus penelitian ini untuk menjelaskan fenomena fungsi komunikasi politik pada sosialisasi dan rekrutmen organisasi inisiator di Partai Buruh Sumatera Barat pada pembentukan partai.

## 1.2 Rumusan Masalah

Persiapan Pemilu Tahun 2024 di Sumatera Barat banyak diwarnai dengan berbagai macam dinamika politik dari masing-masing partai. Begitu juga dengan Partai Buruh Sumatera Barat yang merupakan partai politik yang baru kembali

<sup>19</sup> Ardial. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks. Hlm 30

bangkit di Pemilu 2024. Keikutsertaan Partai Buruh diperlukan persiapan yang matang baik secara struktural partai maupun secara internal. Sebagai partai baru, perlu adanya penguatan basis pendukung Partai Buruh sehingga maka komunikasi politik Partai Buruh dan konstituen akan menjadi kunci untuk memperkuat internal partai.

Pada dinamika partai biasanya setiap partai politik punya caranya sendiri dalam membangun partainya untuk mendapatkan dukungan. Dalam masalah ini peneliti melihat khususnya pada komunikasi politik organisasi inisiator dalam proses usaha membangun suatu partai. Setiap partai tidak lepas dari segala ideologi, misi, dan visinya. Partai politik pada zaman ini membuka ruang yang lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan berdasarkan kelompok. Maka pada partai tidak luput akan kepentingan berdasarkan kelompok ini yang digunakan sebagai dasar basis dukungan dari suatu partai. Di Sumatera Barat sendiri tentu banyak partai politik dengan ragam warna dan bentuk. Menurut Komisioner KPU Sumbar Izwar Yani dikutip website [sumbar.antarnews.com](http://sumbar.antarnews.com) mengungkapkan,

“Di Sumbar sendiri KPU Sumbar melakukan verifikasi terhadap 24 partai politik yang mengajukan dokumen keanggotaannya dan hasilnya ada 13 partai politik yang dinyatakan lolos memenuhi syarat”.<sup>20</sup>

Hal ini dapat dipahami jika pada waktu Pemilu seperti ini merupakan saat untuk mengamati kinerja partai politik. Berbagai *political movement* mulai dilakukan oleh partai politik, seperti komunikasi politik partai dengan konstituennya untuk mengisi kepengurusan di daerah serta dukungan dalam

<sup>20</sup> Sumbar.antara.news. 2022. *KPU Sumbar Tetapkan 13 Partai Lolos Syarat Administrasi di Tingkat Sumbar*. <https://sumbar.antarnews.com/berita/527869/kpu-sumbar-tetapkan-13-partai-lolos-syarat-administrasi-di-tingkat-sumbar> (diakses pada tanggal 10 Januari 2023).

keikutsertaan partai yang telah ditetapkan oleh verifikasi oleh KPU. Berbagai strategi dan siasat dilakukan partai politik untuk dapat lolos verifikasi yaitu kepengurusannya di tiap daerah.

Dalam komunikasi politik pada Partai Buruh Sumatera Barat perlu memahami bagaimana terbentuknya Partai Buruh Sumatera Barat ini. Hal ini karena pengaruh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Bisa dilihat apa saja serikat buruh dan kelompok pekerja yang berdiri di Sumatera Barat. Maka serikat buruh dan kelompok pekerja di Sumatera Barat memiliki basis masa yang cukup sebagai kader di kepengurusan daerah. Kemudian hal ini menjadi tantangan kemampuan di internal Partai Buruh untuk mengakomodir kader-kader dari organisasi-organisasi inisiator. Ini artinya bahwa ada faktor-faktor seperti orientasi sosial dan latar belakang terbentuknya komunikasi politik di dalam susunan partai.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Mustar Alam selaku Ketua Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Partai Buruh Kota Padang. Partai Buruh Sumatera Barat telah didukung oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat, Organisasi Rakyat Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).<sup>21</sup> Hal ini menjadikan wilayah Sumatera Barat sebagai basis yang telah mengisi pekerja buruh dalam tubuh Partai Buruh. Oleh karena itu, Partai Buruh sebagai partai kelas pekerja menjadikan dukungan Partai Buruh dalam semangat kaum pekerja tentu juga tidak lepas dari masing-masing organisasi internal. Organisasi masyarakat tersebut sebagai organisasi inisiator

<sup>21</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Mustar Alam selaku Ketua FSPMSI Sumatera Barat pada tanggal 5 Januari 2023, pukul 17.39. Di Kantor Partai Buruh Sumatera Barat

tentu telah melakukan komunikasi serta arahan untuk mendukung Partai Buruh dalam mengisi keanggotaan dalam setiap tingkatan daerah yang ada di Sumatera Barat.

Kemudian, keikutsertaan Partai Buruh sebagai partai yang kembali muncul dengan mempresentasikan komunikasi politiknya dalam 13 platform sebagai modal perjuangan partai, yang meliputi: (1) kedaulatan rakyat, (2) lapangan kerja, (3) anti korupsi, (4) jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pengangguran, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan air bersih, hingga jaminan makanan untuk rakyat, (5) kedaulatan pangan (tanah, benih, pupuk, anti impor beras untuk petani), kedaulatan ikan, dan kedaulatan ternak, (6) upah layak, (7) pajak untuk kesejahteraan rakyat, (8) hubungan industrial antara lain tolak *outsourcing*, tolak karyawan kontrak berkepanjangan, pesangon yang layak, jam kerja yang manusiawi, perlindungan buruh perempuan, kerja layak, tolak buruh kasar tenaga kerja asing (TKA), tolak pemagangan, dan tolak PHK yang dipermudah, (9) perlindungan perempuan dan anak muda, (10) lingkungan hidup, masyarakat adat, dan HAM, (11) kesejahteraan dan status PNS untuk seluruh guru dan tenaga honorer, (12) pemberdayaan disabilitas, (13) membangun kekuatan BUMN dan koperasi.<sup>22</sup> Berdasarkan platform tersebut Partai Buruh yang tergabung dari berbagai elemen kelompok masyarakat berjuang dengan orientasi yang telah ada dan dipahami.

---

<sup>22</sup> Partai Buruh. *Op. cit.*

Dapat dipahami berdasarkan platform perjuangan Partai buruh tersebut adalah hasil proses komunikasi politik sebagai komitmen organisasi inisiator yang tergabung dalam suatu partai. Bagi partai politik tentu perlu untuk memahami kelompok masyarakat yang menjadi basis masanya untuk dapat berintegrasi, maka dalam pemilihan platform-platform menjadi kunci yang akan digunakan sekaligus menghasilkan keputusan-keputusan penting yang terkait dengan sumberdaya untuk mengimplementasikan kekokohan partai, sebab setiap kelompok masyarakat dapat terwakilkan melalui pendekatan atau komunikasi tertentu. Kemudian Partai Buruh dibentuk sebagai partai alternatif oleh organisasi inisiator pembentuk, artinya organisasi-organisasi ini melebur yang menempatkan partai sebagai alat perjuangan, bukan organisasi di dalamnya yang menjadi alat perjuangan partai.<sup>23</sup> Maka Partai Buruh sebagai alternatif partai kaum pekerja perlu untuk mengokohkan konstituen mereka lebih dahulu untuk pembangunan internalnya sebelum melangkah ke pesta demokrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin jaringan yang kuat secara narasi mengenai isu kelompok pekerja dan serikat buruh yang selama ini belum tersampaikan dengan baik. Pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi menilai.

“Apakah di Sumbar Partai Buruh punya konstituen yang jelas, pemilihan yang jelas. Ini menjadi pertanyaan yang menarik.”<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Agus, Yulianto. 2021. *Terjun ke Politik, Serikat Petani Gabung Partai Buruh*. <https://news.republika.co.id/berita/r0nfve396/terjun-ke-politik-serikat-petani-gabung-partai-buruh> (diakses pada tanggal 11 Januari 2023)

<sup>24</sup> Tribunpadang. 2022. *Hambatan Sosiokultural Partai Buruh di Sumbar, Pengamat: Orang Minang Asing dengan Istilah Buruh*. <https://padang.tribunnews.com/2022/12/19/hambatan-sosiokultural-partai-buruh-di-sumbar-pengamat-orang-minang-asing-dengan-istilah-buruh> (diakses pada tanggal 10 Januari 2023).

Sejalan dengan pertanyaan dari Asrinaldi, sekretaris Partai Buruh Sumatera Barat Rustam Efendi mengatakan.

“Partai Buruh akan bersiap menyongsong Pemilihan Umum 2024. Ini akan kami awali dengan penguatan kapasitas seluruh anggota dan organisasi pendiri,” katanya. Hal ini berdasar pada basis Partai Buruh adalah organisasi-organisasi massa seperti serikat petani, serikat pekerja, nelayan, dan pelaku UMKM. Ada sebelas organisasi pendiri yang mendiami payung partai buruh.”<sup>25</sup>

Lebih lanjut, Pembentukan Partai Buruh Sumatera Barat didukung oleh tiga organisasi buruh yang ada di Sumatera Barat yaitu Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat, Organisasi Rakyat Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (ORI KSPSI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Sebagai informasi perbandingan Partai Buruh Pusat diawali dengan inisiasi 11 organisasi buruh, yang berarti di Sumatera Barat didukung tiga dari sebelas organisasi kelompok pekerja dan serikat buruh.<sup>26</sup> Sebelas Organisasi ini meliputi, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rumah Buruh Indonesia yang didirikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Organisasi Rakyat Indonesia yang diinisiasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Rumah Buruh Indonesia yang diinisiasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Kemudian, Serikat Petani Indonesia (SPI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Rumah Buruh Indonesia Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Rumah Buruh

<sup>25</sup> Langgam. 2022. *Lolos Verifikasi Kpu Partai Buruh Sumbar Target Satu Fraksi di Parlemen*. <https://langgam.id/lolos-verifikasi-kpu-partai-buruh-sumbar-target-satu-fraksi-di-parlemen/> (diakses pada tanggal 10 Januari 2023).

<sup>26</sup> Padangkita.com. 2021. *Partai Buruh Sumbar, Berbasis Kelas Pekerja yang Bakal Perjuangkan Pusaka Tinggi*. <https://padangkita.com/partai-buruh-sumbar-berbasis-kelas-pekerja-yang-bakal-perjuangkan-pusaka-tinggi/> (diakses pada tanggal 9 Januari 2023).

Indonesia Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan, Forum Pendidik dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia, serta Gerakan Perempuan Indonesia. Dari dukungan tersebut Partai Buruh melakukan pergerakan politik melalui pembentuk jaringan antara kelompok masyarakat, ini mengindikasikan adanya komunikasi politik yang telah dibentuk oleh organisasi-organisasi tersebut pada pembentukan Partai Buruh.

Lebih lanjut dalam Partai Buruh provinsi Sumatera Barat tentunya memiliki perberbedaan dengan Partai Buruh provinsi lainnya berdasarkan masa dan pendukung, di mana Sumatera Barat sendiri sebagai wilayah agraris tentu memiliki basis lebih banyak pada organisasi buruh dan serikat pekerja pada sektoral agraris, sehingga di Sumatera Barat sendiri, Partai Buruh mempunyai target untuk merapatkan barisan tiga organisasi pendiri dalam Partai Buruh Sumbar, yakni Organisasi Rakyat Indonesia (ORI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Fraksi Serikat Pekerja Metal Indonesia.<sup>27</sup> Maka kelompok-kelompok kepentingan seperti Serikat Petani Indonesia memainkan peran dalam masyarakat yang agraris di Sumatera Barat, demikian juga pada kelompok pekerja dan serikat buruh didalam masyarakat industri juga memainkan peran politiknya walaupun tidak sebanyak masa masyarakat agraris.

Hal ini menjadi suatu upaya pengembangan komunikasi politik untuk memberdayakan kelompok pekerja dan serikat buruh dan dalam mengakomodir basis dukungan di dalam tubuh Partai Buruh. Dengan begitu Partai Buruh telah

---

<sup>27</sup> Aksara. 2022. *Sejarah Panjang Gerakan Buruh di Indonesia dan Menanti Gebrakan Partai Buruh di Pemilu 2024*. <https://infosumbar.net/berita/berita-sumbar/sejarah-panjang-gerakan-buruh-di-indonesia-dan-menanti-gebrakan-partai-buruh-di-pemilu-2024/> (Diakses pada tanggal 10 Januari 2023)

melakukan komunikasi politik internal dari organisasi kelas pekerja pada proses pembentukan partainya. Interaksi komunikasi organisasi kelas pekerja ini juga telah dilakukan secara langsung yaitu Presiden Partai Buruh, Said Iqbal waktu menghadiri konsolidasi akbar Partai Buruh Sumatera Barat di Aula Asrama Haji Padang, Kota Padang pada Senin, 22 November 2021. Dalam konsolidasi tersebut dihadiri ratusan peserta yang berasal dari berbagai organisasi buruh seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Serikat Petani Indonesia, dan lainnya. Pada kesempatan itu, Said menjelaskan pentingnya para buruh untuk memiliki dan bergabung dalam partai politik.<sup>28</sup>

Selain itu dengan momentum pembentukan kembali Partai Buruh terhadap dukungan dari banyak elemen ini juga dipengaruhi jaringan kuat dari semangat perjuangan dan kesejahteraan buruh pada tahun 2020 yaitu aksi kaum buruh dalam penolakan Omnibus Law khususnya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Melihat atas respon UU Omnibus Law Cipta Kerja ini maka berdasarkan itu Partai Buruh mendeklarasikan pembentukan partai.<sup>29</sup> Latar belakang Partai Buruh itu kembali dihidupkan adalah omnibus law atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI pada tahun lalu.

Sikap dari pembentukan Partai Buruh merupakan sebab akibat dari hubungan kaum buruh serta serikat pekerja dalam menjadikan kesatuan bulat yang kemudian melahirkan Partai Buruh yang memiliki tujuan untuk dapat menyuarakan aspirasi

<sup>28</sup> Padangkita.com 2021. *Di hadiri Said Iqbal, Konsolidasi Partai Buruh Exco Sumbar Resmi Digelar.* <https://padangkita.com/dihadiri-said-iqbal-konsolidasi-partai-buruh-exco-sumbar-resmi-digelar/> (diakses pada tanggal 10 Januari 2023).

<sup>29</sup> Newsdetik.com 2021. *Alasan Partai Buruh Bangkit Kembali: Pengesahan Omnibus Law.* <https://news.detik.com/berita/d-5753780/alasan-partai-buruh-bangkit-kembali-pengesahan-omnibus-law> (diakses pada tanggal 9 Januari 2023).

rakyat. Dengan ini pengaruh yang telah diciptakan ikut terlibat dalam proses pembentukan Partai Buruh khususnya dari segi komunikasi politik. Dengan munculnya Partai Buruh sebagai kekuatan yang dipengaruhi dari persamaan nasib oleh kaum buruh dan kelas pekerja. Hal ini menandakan bahwa ada komunikasi politik dari elemen-elemen kelompok buruh dan serikat pekerja sehingga terlibat dalam percaturan politik di Indonesia. Dengan itu, pada akhirnya dominasi para buruh dan pekerja yang ada di setiap daerah dan pengaruh keterlibatan elit buruh dan kelompok pekerja lokal, menjadi salah satu faktor penentu dalam pembentukan perwakilan Partai Buruh di Sumatera Barat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka asumsi penelitian ini adalah bahwa adanya komunikasi politik organisasi-organisasi kelas pekerja sebagai inisiator dalam pembentukan Partai Buruh pada fenomena ini di Sumatera Barat. Hal tersebutlah yang menjadikan alasan penelitian ini dilakukan dengan menggali lebih dalam informasi dari lapangan dan kemudian menganalisis proses komunikasi politik antara organisasi-organisasi inisiator tersebut sebagai salah satu elemen kuat konstituen partai politik tersebut. Penelitian ini juga memberikan *consent* penjelasan yang lebih dalam terhadap partai baru khususnya konsen komunikasi politik pada pelaksanaan sosialisasi dan rekrutmen politik.

Penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik oleh Gabriel Almond. Almond berpendapat bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam dalam setiap sistem politik, lebih lanjut bahwa komunikasi politik sebagai salah satu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi sosialisasi, rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi, yang terdapat dalam suatu sistem

politik.<sup>30</sup> Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana komunikasi politik, fungsi sosialisasi dan rekrutmen politik organisasi inisiator pembentukan Partai Buruh Sumatera Barat?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan komunikasi politik pada fungsi sosialisasi dan rekrutmen politik organisasi inisiator pembentuk partai di Partai Buruh Sumatera Barat.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Secara Akademis

Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan komunikasi politik pada fungsi sosialisasi dan rekrutmen politik organisasi inisiator pembentuk partai Buruh di Partai Buruh Sumatera Barat.

#### 2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku, akademisi, masyarakat dan partai politik untuk memahami proses komunikasi politik yang terjadi serta bahan masukan bagi partai baru dalam membangun partai politik.

<sup>30</sup> Sahya Anggara. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia Bandung. Hlm. 19